



TRANSFORMASI DIGITAL KEPEGAWAIAN

Andry Prayugo



TRANSFORMASI DIGITAL KEPEGAWAIAN



eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



DIREKTORAT HAK KEWAJIBAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & PERADILAN NASIONAL
ECC002025118489

ISBN 978-634-246-111-0



9

786342

481110

TRANSFORMASI DIGITAL KEPEGAWAIAN

Andry Prayugo



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

TRANSFORMASI DIGITAL KEPEGAWAIAN

Penulis : Andry Prayugo
Editor : Darmawan Edi Winoto, S.Pd. M.Pd.
Desain Sampul : Firman Isma'il
Tata Letak : Ika Rahayu
ISBN : 978-634-248-111-0
No. HKI : EC002025118489
Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JULI 2025**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2025

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Transformasi Digital Kepegawaian”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini, serta Orang Tua dan Keluarga yang terus memberi semangat dan doa. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini membahas transformasi digital yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi untuk menuju sistem tata kelola yang modern. Buku ini terdiri dari 6 bab yakni 1. Pendahuluan, 2. Tata Kelola Pemerintahan, 3. Teori Manajemen Pemerintahan, 4. Sistem Absensi Online, 5. Implementasi Sistem Absensi Online, dan 6. Penutup.

Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 TATA KELOLA PEMERINTAHAN	10
A. Sistem Tata Kelola <i>Good Governance</i>	10
B. Sistem Tata Kelola <i>Sound Governance</i>	13
C. Sistem Tata Kelola <i>Smart Governance</i>	15
D. Sistem Tata Kelola <i>Collaborative Governance</i>	18
E. Sistem Tata Kelola <i>Dynamic Governance</i>	21
BAB 3 TEORI MANAJEMEN PEMERINTAHAN	28
A. Teori Administrasi Publik.....	28
B. Teori Sistem Informasi.....	29
C. Teori Transformasi Digital.....	36
BAB 4 SISTEM ABSENSI ONLINE	45
A. Pengertian Sistem Absensi <i>Online</i> (SAO)	45
B. Kebijakan dan Regulasi Pendukung	47
C. Tujuan dan Fungsi Sistem Absensi <i>Online</i> (SAO).....	48
D. Teknis Sistem Absensi <i>Online</i> Berbasis <i>Fingerprint</i> <i>Biometric</i>	49
BAB 5 IMPLEMENTASI SISTEM ABSENSI ONLINE	54
A. Transformasi Tata Kelola Pemerintah Modern	54
B. Evaluasi dan Pengembangan Sistem.....	60
C. Tantangan dan Solusi Pengembangan Sistem.....	63
D. Peluang Perbaikan dan Transformasi Berkelanjutan ..	66
BAB 6 PENUTUP	68
DAFTAR PUSTAKA	70
TENTANG PENULIS	74

BAB

1

PENDAHULUAN

Momentum Pemerintah melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada semua lapisan masyarakat, pemerintah sendiri dan pihak-pihak lain. Iyanya bisa menjadi celah untuk memaksa pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, saling berkolaborasi dan terintegrasi dengan sistem antara instansi pemerintah itu sendiri guna pencapaian target capain bersama, selain itu menambah nilai dan jangkauan pelayanan lebih menyeluruh kepada masyarakat tidak hanya di kota tapi menjangkau yang berada di pedalaman dan daerah terpencil, serta bisa menjadi alat pengawasan dan kontrol untuk memperkecil dan menghilangkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang berakibat merugikan Negara itu sendiri. Jumlah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Provinsi Kalimantan Timur per tanggal **25 Mei 2025** bersumber dari database SIMASN BKD Kaltim sebanyak 16.836 orang.

Dalam Upaya meningkatkan kualitas tata kelola kepegawaian dan pengawasan terhadap kedisiplinan serta kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghadapi tantangan besar dalam cakupan pengelolaan data absensi ASN. Tercatat sebanyak 16.836 pegawai yang tersebar di seluruh wilayah provinsi, yang terdiri dari 436 perangkat daerah (PD), 68 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 6 cabang Dinas

BAB 2

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Dalam konteks birokrasi, digitalisasi menjadi strategi penting untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, efisien dan akuntabel. Transformasi digital bukan hanya perubahan alat, tetap merupakan perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya aparatur negara.

Good Governance, Sound Governance, Smart Governance, Collaborative Governance, dan dynamic Governance adalah sebuah konsep Paradigma tata Kelola Pemerintahan yang baik dari yang menjadi acuan untuk pengelolaan dan aktivitas pemerintahan, paradigma ini menyampaikan bahwa bila suatu Pemerintahan menggunakan beberapa konsep di atas, maka pemerintahan tersebut tidak akan melaksanakan kediktatoran, korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan penggunaan anggaran yang dipastikan hanya akan merugikan dan berdampak buruk terhadap pemerintahan itu sendiri dan masyarakatnya.

A. Sistem Tata Kelola *Good Governance*

Perkembangan sistem pemerintahan modern telah mendorong lahirnya berbagai paradigma baru dalam tata kelola publik. Salah satu konsep paling menonjol dan luas digunakan dalam praktik administrasi publik dewasa ini adalah *Good Governance*. Konsep ini menjadi acuan penting dalam upaya

BAB 3

TEORI MANAJEMEN PEMERINTAHAN

A. Teori Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana kebijakan pemerintah diimplementasikan dan bagaimana birokrasi berfungsi dalam menjalankan pelayanan publik. Secara umum, administrasi publik adalah proses pengelolaan berbagai kegiatan pemerintahan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi dan pengawasan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Dwight Waldo (1948) dalam bukunya *The Administrative State*, administrasi publik tidak hanya bersifat teknis tetapi juga memiliki aspek politik dan etis. Ia menekankan bahwa birokrasi tidak netral, dan kebijakan publik selalu melibatkan nilai serta pengaruh kekuasaan. Artinya, proses administrasi publik bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang akuntabilitas dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Nicholas Henry (1975) Membagi perkembangan administrasi publik ke dalam beberapa paradigma : dari paradigma politik - administrasi, manajemen publik, teori organisasi, hingga administrasi publik baru. Perkembangan ini menunjukkan bahwa administrasi publik bersifat dinamis dan terus beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi dan teknologi.

BAB

4

SISTEM ABSENSI ONLINE

A. Pengertian Sistem Absensi Online (SAO)

Konsep Sistem Absensi Online merupakan bentuk inovasi digital dalam manajemen kehadiran pegawai yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna menciptakan sistem pencatatan kehadiran yang lebih efisien, akurat dan transparan. Sistem ini menggantikan metode manual seperti daftar hadir kertas/buku atau mesin ceklok (*Time Card*) dengan sistem yang berbasis perangkat elektronik yang terkoneksi ke jaringan internet, server pusat dan aplikasi yang terintegrasi. Dalam implementasinya, absensi online umumnya menggunakan *fingerprint* biometrik, *face recognition* hingga *geotagging* yang berbasis GPS (*Global Positioning System*), yang memungkinkan pencatatan kehadiran dilakukan secara real-time, baik di kantor pusat maupun di unit kerja teknis (UPTD) serta memfasilitasi konsep lokasi kerja modern (*work from Home, Work from Anywhere*).

Sistem ini mendukung prinsip efisiensi birokrasi karena data kehadiran dapat dimonitor langsung oleh instansi pembina seperti BKD, tanpa harus menunggu laporan manual dari masing-masing perangkat daerah. Selain itu, konsep ini juga sejalan dengan kebijakan nasional terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sesuai dengan prinsip pada pasal 2 Peraturan Presiden no 95 tahun 2018 yaitu : Efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas dan keamanan. Dengan sistem absensi online,

BAB 5

IMPLEMENTASI SISTEM ABSENSI ONLINE

A. Transformasi Tata Kelola Pemerintah Modern

Transformasi digital adalah proses adopsi teknologi digital untuk mengubah cara suatu organisasi beroperasi, memberikan layanan dan menciptakan nilai tambah melalui inovasi berbasis teknologi. Menurut ⁷⁹transformasi digital bukan hanya soal mengadopsi teknologi, tetapi menyangkut perubahan mendasar pada proses, struktur organisasi dan budaya kerja. Dalam konteks ini BKD Provinsi Kalimantan Timur, transformasi digital tercermin dalam pergeseran dari sistem absensi manual berbasis formulir kehadiran dan *fingerprint* lokal menuju Sistem Absensi Online (SAO) yang terintegrasi secara digital dan dapat dipantau secara real-time oleh unit kepegawaian.

SAO adalah aplikasi digital yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mencatat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) secara elektronik, menggunakan teknologi *Fingerprint*, GPS dan internet. Sistem ini memungkinkan pemantauan kedisiplinan dan kehadiran ASN secara transparan, akurat dan efisien. Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 38 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2021.

Dynamic Governance adalah kerangka berpikir dan pendekatan tata kelola yang dikembangkan oleh Neo Boon Siong dan Geraldine Chen (2007), yang menekankan pentingnya "*Thinking ahead, Thinking Again dan Thinking Across*". Sebagai

BAB

6

PENUTUP

Transformasi Digital sebagai Strategi Modernisasi. Implementasi sistem absensi online fingerprint merupakan bagian dari strategi modernisasi administrasi kepegawaian, yang mendukung kebijakan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) dan bertujuan meningkatkan kedisiplinan, akuntabilitas serta efisiensi pengelolaan data ASN.

Program *Dynamic Governance* pendekatan dalam implementasi SAO di BKD Kaltim tercermin dalam berbagai aspek:

1. *Thinking Ahead*: Perencanaan jangka panjang telah dimulai dengan digitalisasi sistem manual, meskipun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masa depan.
2. *Thinking Again*: Evaluasi terhadap sistem sudah dilakukan, namun belum mengarah pada terobosan signifikan untuk menghadirkan sistem yang lebih adaptif.
3. *Thinking Across*: Koordinasi lintas instansi masih terbatas, integrasi antar perangkat daerah perlu diperkuat untuk sistem yang lebih komprehensif.

Kelemahan teknologi Sistem yang ada. Meskipun sistem *fingerprint* membantu proses pencatatan kehadiran yang lebih objektif dan terpusat, namun teknologi yang digunakan saat ini memiliki keterbatasan, terutama dari sisi :

1. Ketergantungan pada perangkat fisik (mesin *Fingerprint*) yang mahal dalam pengadaan dan pemeliharaan.
2. Keterbatasan fleksibilitas ASN dalam bekerja dilapangan atau lokasi terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Bannister, F. & Connolly, R. (2012) - Defining e-Governance dalam *Government Information Quarterly (JURNAL)*
- Boon Siong NEO, Geraldine CHEN, *Dynamic Governance, Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore*. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. Singapore. 2007
- Creswell, John W., *Research Design : Qualitative, Quantitative and mixed methods approaches*. second edition (2014)
- Dunn, N., William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. ISBN : 978-1560007288. kalau prof edy prasojo da
- Dwight Waldo. 1948. *The Administrative State : A Study of The Political Theory of American Public Administration*. The Ronald Press Company - New York.
- E.E.W. Tulungan, J.B. Maramis dan D.P.E. Saerang dalam jurnal EMBA "*Transformasi Digital : Peran Kepemimpinan Digital*".(2022)
- Eko Prasojo. *Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan yang Baik: Kasus Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2011
- Farazman, Ali, *Sound Governance : Policy and Administrative Innovations*, Westport, Connecticut London (2004)
- Holzacker, Wittek, & Woltjer, *Decentralization and Governance in Indonesia, Volume 2*, Yulin Hou, Syracuse, USA 2016 dalam *Lesmana Rian Andhika 2017 hal 88*.
- Kane et al. Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation*. Harvard Business Review Press. (MIT Sloan, 2015)

- Kroenke David & Boyle, Randall J. Using MIS, eight Edition, Pearson, Boston (2018)
- Kumar M. & Best, M. L. - *Impact and Sustainability of E-Government Services in Developing Countries* (2006)
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.
- Muhammad Imran Sarwar, Qaiser Abbas, Tahir Alyas, Ali Alzahrani, Turki Alghamdi, Yazed Alsaawi. *Digital Transformation of Public Sector Governance With IT Service Management – A Pilot Study*. 2022. Article in IEEE Access.
- Muhammad Suyudi, Ayatullah Hadi dan Hidayatullah, *Transformasi Digital terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai*. Tahun 2023, Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Nicolas Henry, *Public Administration and Public Affairs*, Georgia Southem University, Routledge, Newyork. (2018)
- Nursyifa Indah Maharani, *Keefektifan Layanan Administrasi Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi Oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut*. Tahun 2021
- Olga Osipova, *Digital transformation of personnel management services*, 2019. Atlantis Highlights in Computer Sciences, volume 1
- Richard Heeks, *Implementing and Managing eGovernment : An International Text*. Sage Publication. London EC1Y 1SP 2006.
- Senn, James A., 1995, *Information Technology in Business, Principles, Practices, and Opportunities*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Siti Aminah, Herie Saksono, *Digital Transformation of the Government: A Case Study in Indonesia*, 2021. Malaysian Journal of Communication
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. 2018

Syahrul Walidi, Pitri Andini, Rido Ilahi dan Yulia Henoselina, *Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi di Sektor Publik*, tahun 2024. Penerbit Perspektif Administrasi Publik dan hukum.

Verhoef, Peter C., etc. *Digital Transformation : A multidisciplinary reflection and research agenda*, University of Groningen, (2021).

Regulasi

Peraturan Gubernur No 38 Tahun 2019 Tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Gubernur No 78 Tahun 2019 tentang tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja bahwa BKD Prov Kaltim.

Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2021 Pengelolaan Kehadiran Aparatur Sipil Negara secara Elektronik.

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Undang-Undang No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Media Informasi

Antara News, <https://kaltim.antaranews.com/berita/19213/tujuh-instansi-kaltim-jadi-percontohan-absensi-online>

Antara News, <https://kaltim.antaranews.com/berita/33277/bkd-latih-operator-upt-pemprov-kaltim>

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen ASN.
(<https://simasn.kaltimprov.go.id/>)

Kaltimpost Online, <https://kalpostonline.com/headline/dasar-hukum-pemotongan-tpp-pns-di-pemprov-kaltim-dinilai-inspektorat-lemah/2020/>

Kominfonews; 2023, <https://diskominfo.samarindakota.go.id/kabar-pemerintahan/kecamatan-samarinda-seberang-dipilih-sebagai-pilot-project-kecamatan-digital-oleh-wali-kota-samarinda>).

Media Informasi dan layanan administrasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Portal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. (<https://bkd.kaltimprov.go.id>)

PUSKOMEDIA INDONESIA, Mar 14, 2024, <https://www.jambusari.desa.id/smart-governance-membangun-desajambusari-dengan-teknologi-dan-digitalisasi/>).

TENTANG PENULIS



Andry Prayugo. Penulis lahir di Kota Samarinda, 9 oktober 1974. Pendidikan penulis dari SD hingga perkuliahan di Kota Samarinda. Pengalaman kerja pernah menjadi tenaga pembuat website pada Perusahaan Meganet Samarinda. Kemudian berkarir di pemerintahan, menangani informasi dan teknologi serta keuangan daerah. Tertarik pada teknologi informasi terbaru yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia.

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025118489_25 Agustus 2025

Pencipta

Nama : **Andry Prayugo**

Alamat : Talangani Regency, Cluster Angrek, Blok J No 11, Samarinda, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75119

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Andry Prayugo**

Alamat : Talangani Regency, Cluster Angrek, Blok J No 11, Samarinda, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75119

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Transformasi Digital Kepegawaian**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 16 Juli 2025, di Kab. Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 000958750

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, SH, MH.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah diiseg secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.